



Dewan Endus Ada Dugaan Gratifikasi

Penerimaan Tenaga Satpol PP Kota Jogja

JOGJA, Radar Jogja - Anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto mengendus dugaan gratifikasi penerimaan tenaga pengamanan Satpol PP Kota Jogja. Pasca ada aduan dari seorang warga yang mendadak dipecat pada Maret 2023.

"Dalam aduannya, warga tersebut dengan inisial F menyampaikan ketidakpuasannya mengapa dipecat," ujarnya kemarin (19/5).

Secara kronologis, warga yang berstatus *outsourcing* itu mendapat surat dari pihak ketiga. Isinya diminta datang dan langsung mendapat pemberitahuan berhenti bekerja sebagai tenaga pengamanan di Balai Kota Jogja bulan Maret 2023.



DIINGATKAN: Petugas Satpol PP Kota Jogja saat melakukan penertiban kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro.

"Ada yang aneh mengapa pada Maret 2023 baru diberhentikan, padahal seharusnya karena tenaga *outsourcing* maka di bulan Desember 2022 sudah tanda tangan kontrak selama

setahun," ungkap Fokki. Berdasarkan hasil investigasi dan komunikasi yang dilakukan, justru mendapatkan temuan baru. Setidaknya ada puluhan orang tenaga pengamanan di

Balai Kota Jogja yang mengalami nasib serupa. "Dan ini semakin menarik untuk ditelisik lebih jauh lagi, ada apa ini?," tambahnya.

Maka kurun waktu tiga bulan mulai Maret hingga Mei 2023 dilakukan pengumpulan informasi. Fokki menyebut dugaan gratifikasi. Modus operasi di lapangan, diduga ada oknum pejabat meminta uang kepada beberapa orang agar bekerja sebagai tenaga pengamanan di Balai Kota. Dan menggantikan posisi orang yang telah dipecat. "Dugaan indikasi gratifikasi kepada salah satu oknum pejabat Satpol PP Kota Jogja yang sekarang sudah dimutasi ke instansi lain dan kasus tersebut sudah diperiksa oleh inspektorat," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, DPRD meminta inspektorat Kota Jogja bersikap tegas,

terbuka dan transparan. Termasuk memanggil mereka yang diberhentikan dan diberi penjelasan.

Sebab sudah banyak indikasi yang bermunculan atas kejadian tersebut. Dia menyebut berdasarkan data yang diverifikasi, mayoritas yang dimintai uang ber-KTP luar Kota Jogja.

"Selaku wakil rakyat menuntut inspektorat untuk menyampaikan ke publik hasil investigasinya. Walaupun berdasarkan info bahwa belum ada pengakuan tetapi 'bau kentut semakin busuk,' ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuridijaya saat dikonfirmasi mengatakan, informasi terkait hal itu segera disampaikan. "Saya kira itu pada saatnya akan kami sampaikan," ujarnya. **(lan/laz/er)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005